

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA  
SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas

Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**BEKTI RETNO SETYO ARTI**

**NPM: 1321020064**

**Jurusan : Siyasa**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438H/2017 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA**

**SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**BEKTI RETNO SETYOARTI**

**NPM: 1321020064**

**Jurusan : Siyasah**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Pembimbing II : Frenky, M.Si.**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438H/2017 M**

## ABSTRAK

### TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

**Bekti Retno Setyo Arti**

Warganegara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, oleh sebab itu tidak boleh ada suatu diskriminasi terhadap hak-hak warganegaranya dan warganegara asing yang sedang melakukan pencarian suaka politik. *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) lahir sebagai manifestasi dari situasi serius penanganan pengungsi tahun 1949-an. Suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon. Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan, karena setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak penerima suaka politik menurut hukum internasional. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan, yang bersifat metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan terhadap suaka politik tentang hak-hak penerima suaka menurut fiqh siyasah.

Kesimpulan dalam penelitian adalah Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional meliputi: pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi karena hal ini merupakan unsur penting dari sistem internasional untuk perlindungan bagi pengungsi. Dan hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional ini juga sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at karena sesuai dengan yang ada di dalam fiqh siyasah seperti hak pengamanan harta benda, penyatuan keluarga, perlindungan khusus anak, kebebasan berkeyakinan, tempat tinggal yang layak, dan mendapat perlindungan hukum yang adil. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional yang menjamin HAM pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsi pun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia khawatir akan mengalami persekusi.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : Bkti Retno Setyo Arti**  
**NPM : 1321020064**  
**Prodi : Siyasah**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. Henry iwansyah, M.A.**  
**NIP. 197009011997031002**

**Pembimbing II**

**Frenky, M.Si.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs Susiadi AS.,M. Sos.I**  
**NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let Kol H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**. Disusun oleh **Bekti Retno Setyo Arti NPM 1321020064** Jurusan Siyasa telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal :

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs, Susiadi AS., M. Sos. I.**

(.....)

**Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

(.....)



**DEKAN**

**Dr. Abdussyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197009011997031002

## MOTTO

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS. Surat At-Taubah ayat 6).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafa'atnya. Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya :

1. Kedua orang tuaku, pahlawan terhebat dalam hidupku Ayahanda Sutrisno Hadi Prayitno dan malaikat tak bersayap Ibunda Laela R. yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai, serta mendo'akan setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, semoga Allah SWT mengabulkan semua do'a kalian, memuliakan kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adik-adikku tercinta yang selalu menjadi kebanggaanku (Arif Rahman Hakim dan Victor Nanang Hambali).
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Bekti Retno Setyo Arti, lahir pada tanggal 12 Oktober 1994 di Desa Pajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sutrisno Hadi Prayitno dan Ibu Laela R. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK ABA AISIYAH (Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2000
2. SD 01 Pajar Mataram (Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2006
3. SMP N 06 Terbanggi Besar (Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2010
4. SMA N 01 Seputih Mataram (Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2013
5. Universiats Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah dari tahun 2013 hingga saat ini.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**, Shalawat beserta salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah yang mulia yakni Rasulullah Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. berserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.,Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Ketua Jurusan Siyasah bapak Drs Susiadi AS.,M. Sos.I dan sekertaris jurusan Siyasah bapak Frenki M.Si.
4. Pembimbing I bapak Drs. Henry iwansyah, M.A. dan pembimbing II bapak Frenky, M.Si. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.
7. Bapak dan Ibu guruku dari SD, SMP, dan sampai SMA terimakasih atas ilmunya dan pengalaman yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 05 Desember 2017

Penulis

**Bekti Retno Setvo Arti**

NPM. 1321020064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II    HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK MENURUT FIQH SIYASAH**

A. Pengertian Suaka Politik dalam Fiqh Siyasa .....	15
B. Ketentuan Hukum dalam Fiqh Siyasa tentang Suaka Politik ...	25

C. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Hak-Hak Penerima Suaka Politik .....	33
--	----

### **BAB III HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM**

#### **INTERNASIONAL**

A. Pengertian Suaka Politik .....	38
B. Ketetapan Hukum Internasional tentang Perlindungan bagi Pencari Suaka Politik .....	47
C. Hak-Hak bagi Penerima Suaka Politik .....	54

### **BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK**

#### **PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM**

#### **INTERNASIONAL**

A. Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional	63
B. Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional menurut Fiqh Siyasah .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini yaitu mengenai **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional**, maka secara ringkas akan dijelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Hak-hak penerima suaka politik. Hak adalah yang benar, kewenangan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang/peraturan lain.<sup>3</sup> Penerima adalah orang yang menerima<sup>4</sup> sedangkan suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon

---

<sup>1</sup> Hasby Ash-shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 35.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 154.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1054.

suaka<sup>5</sup>. Dengan demikian hak-hak penerima suaka politik adalah suatu hak yang diperoleh oleh para pencari suaka politik di negara lain untuk mendapat perlindungan.

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu hak-hak yang diberikan oleh suatu negara kepada para pencari perlindungan atau suaka politik berdasarkan hukum internasional dan kemudian ditinjau menurut fiqh siyasah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Alasan yang mendasari dipilihnya judul ini adalah masih ada kelompok warga di sejumlah negara yang tidak menikmati perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka, sebaliknya mereka mendapat penindasan atau penyiksaan dari penguasa mereka, atau mendapatkan ketidakamanan karena adanya peperangan atau konflik di negara mereka. Mereka pun kemudian mengungsi atau bahkan mencari suaka

---

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 265.

<sup>6</sup>Cairul Anwar, *Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, (Jakarta: Djembatan, 1989), hlm. 2

dari negara lain untuk menghindari penindasan atau untuk memperoleh kehidupan yang aman dan damai.

- b. Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

## C. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah ditetapkan sekitar 60 tahun lalu, yakni pada 10 Desember 1948. Meski demikian, baru dalam dua dasawarsa terakhir ini hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi isu penting dalam hubungan antar bangsa, yakni sejak runtuhnya sistem sosialisme atau komunisme di Eropa Timur. Hampir seluruh pemerintah di dunia pada saat ini mengklaim bahwa mereka mendukung sistem demokrasi dan



perlindungan terhadap HAM.<sup>7</sup> Namun dalam kenyataannya, kini masih ada kelompok warga di sejumlah negara yang tidak menikmati perlindungan terhadap HAM mereka. Sebaliknya mereka mendapat penindasan atau penyiksaan dari penguasa mereka, atau mendapatkan ketidakamanan karena adanya peperangan atau konflik di negara mereka. Merekapun kemudian mengungsi atau bahkan mencari suaka dari negara lain untuk menghindari penindasan atau untuk memperoleh kehidupan yang aman dan damai.

Fenomena tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak masalalu, sehingga dalam pasal UHDR telah disebutkan dengan jelas tentang persoalan pengungsian dan suaka ini, yakni “setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari penganiayaan”. Hal ini kemudian diperkuat dengan pembentukan *United Nations Hight Commission for Refugees* (UNHCR) pada tahun 1950. Beberapa bulan kemudian negara-negara anggota PBB menyetujui konvensi tentang Status Pengungsi (*Refugee Confention*) tahun 1951 di Jenewa dan kemudian protokol tentang status pengungsian tahun 1967.

*United Nations Hight Commission for Refugees* (UNHCR) lahir sebagai manifestasi dari situasi serius penanganan pengungsi tahun 1949-an. Kewenangan yang diberikan kepada UNHCR bersifat lebih komprehensif dibanding pada masa IRO<sup>8</sup>. UNHCR adalah organisasi yang diberi mandat oleh PBB untuk mengurus permasalahan pengungsi, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara dan UNHCR adalah actor utama yang memiliki kewajiban dalam

---

<sup>7</sup> Yudha Bhakti Ardhiwirasastra, *Hukum Internasional, Bunga rampai*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 107.

<sup>8</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 138.

memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi.<sup>9</sup> Tugas utama dari UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional dan membantu mencari solusi permanen bagi para pengungsi dengan menghubungkan pemerintah untuk memfasilitasi para pengungsi ini.<sup>10</sup>

Suaka Politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi. Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik.<sup>11</sup>

Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi dimana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia, dan aturan hukum internasional. Seluruh negara menerima Konvensi Terkait Status Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang ke negerinya.

Suaka merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing. Normalnya suaka diberikan terhadap warga negara asing

---

<sup>9 9</sup> Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 61.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 170.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 310.

yang di negara asalnya mengalami penindasan, ketakutan atau menghadapi kemungkinan akan disiksa karena alasan ras, agama, anggota kelompok minoritas, ideologi atau keyakinan politiknya.

Disamping itu harus diingat bahwa hak suaka merupakan hak negara sebagai atribut dari kemerdekaan dan kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Individu berhak mengajukan permintaan suaka, tetapi permintaan tersebut akan dikabulkan atau ditolak merupakan kewenangan sepenuhnya dari negara yang diminta. Dalam hal ini Islam juga membahas mengenai hak-hak para penerima suaka politik sehingga Islam sangat menghargai eksistensi manusia, sehingga seseorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang meminta perlindungan darinya, yang dalam fiqh disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun berkewajiban memperlakukan mereka yang mengungsi atau yang meminta suaka politik (*al-huju'al-siyasi*) dengan baik dan tanpa diskriminasi, Nabi Muhammad telah mempraktikkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya juga pernah menjalani pengungsian ini yang disebut “*hijrah*” untuk menghindari gangguan dan penindasan orang-orang kafir Mekah. Bahkan hijrah ini menjadi wajib jika

seseorang tidak bisa mendapatkan hidup bebas dan sebaliknya mendapatkan penindasan dari pemerintah atau penduduk setempat, terutama kebebasan melaksanakan agama.<sup>12</sup> Perintah hijrah ini disebut antara lain dalam Q.S. AN-Nisa' ayat 97:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Kedua ayat di atas mengandung pengertian, bahwa jika yang meminta perlindungan atau suaka itu adalah pihak luar (non-Muslim), permintaan ini disebut aman, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika yang meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) itu orang muslim, pengungsi ini disebut *hijrah*, dan orangnya disebut *muhajir*. Dengan terjadinya perkembangan dunia pada saat ini, kedua bentuk pengungsian tersebut tidak lagi dipergunakan secara resmi. Istilah baru yang dipakai adalah pengungsi (*refugee, al-laji*) dan suaka politik (*asylum, al-luju' al-siyasi*) motivasi atau latar belakang terjadinya pengungsian atau perpindahan itu sama, yakni ada penindasan, maka hukum fiqh klasik itu bisa dipergunakan untuk hukum pengungsi dan suaka pada saat ini.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 200.

Ajaran Islam mengenai hak-hak yang diberikan kepada umat muslim terkait dengan filosofi hukum Islam yang disebut teori *maqashid al-syari'ah*, yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan (*dharuriyyat*) yang menurut Ibn 'Asyur meliputi :<sup>13</sup>

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)
- d. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)
- e. Perlindungan terhadap nasab (*hifzh al-nasab*)
- f. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*)

Teori *maqashid al-syari'ah* diatas menunjukkan bahwa dalam Islam memperhatikan perlindungan bagi individu setiap muslim, hal ini terkait dengan hak asasi manusia yang didalam undang-undangnya juga terdapat hak-hak bagi setiap manusia, begitupun dengan para pencari suaka mereka berhak mendapatkan hak perlindungan. Dalam hal perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, Islam memberikan perlindungan bagi setiap kalangan, maupun untuk non-muslim, karena sebagaimana firman Allah SWT, untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrik sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu). Hal ini tidak seperti perlindungan yang diberikan melalui hukum internasional, karena menurut hukum internasional pemberian perlindungan tergantung oleh negara itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

Sayangnya sampai saat ini secara umum hak-hak para pengungsi dan pencari suaka itu tidak atau kurang terlindungi, baik karena masih ada negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut, tidak adanya *political will* dari pemerintah di sejumlah negara, atau karena masih ada rasisnya atau *xenofobia* di sejumlah negara, maka dari itu hak-hak para pencari suaka yang terdapat dalam hukum internasional maupun fiqh siyasah terdapat keterkaitan, yaitu bagaimana hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional dan tinjauan menurut fiqh siyasah perlu untuk diteliti secara mendalam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak penerima suaka politik menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.
  - b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.
  - c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami hak-hak penerima suaka politik dalam fiqh siyasah.
  - d. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Manfaat secara praktis
- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
  - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  - c. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan fiqh siyasah mengenai hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional.
  - d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.



## F. Metode Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). *Library research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.<sup>14</sup>
- b. Sifat Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan, untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat kesimpulan terhadap suaka politik tentang hak-hak penerima suaka menurut fiqh siyasah. Penelitian juga menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, Al-Hadist. Serta metode komparatif yaitu membandingkan antara hukum Internasional dan fiqh siyasah untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti dan metode

---

<sup>14</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul dimasa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah.<sup>15</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, menggunakan undang-undang maupun al-qur'an.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku karangan Muhammad Iqbal tentang fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam, buku karangan Ija Suntana tentang politik hubungan internasional Islam (siyasah dauliyah), dan buku hak-hak pencarian suaka dalam syariat Islam dan hukum internasional.
- 3) Bahan Hukum Tersier, seperti buku online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini.

---

<sup>15</sup>Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Departemen Agama, 1986), h. 16.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai fiqh siyasah, undang-undang, maupun al-qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan berbagai instrument pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi lain.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah manipulasi data kedalam bentuk yang berupa informasi. Kegiatan ini meliputi tahap pemeriksaan data, penandaan data (*coding*) dan penyederhanaan data. Tahap pemeriksaan dan meneliti kembali data (*editing*) yang sudah terkumpul bermaksud untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap menganalisis berikutnya. Selain

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 37.

itu juga untuk mengetahui apakah informasi yang didapatkan berkaitan dan dapat membantu menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>17</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Lexy J. Moeleong merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran jelas dan menyeluruh serta diperoleh dari bahan bacaan atau buku-buku. Serta dengan mendeskripsikan data hasil penelitian kepustakaan tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.<sup>18</sup>

Metode berfikir dalam analisis data dapat berupa metode induktif dan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi contoh- contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan yang bersifat umum tersebut.<sup>19</sup> Sedangkan metode induktif adalah metode berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat kualitatif lebih cenderung menggunakan metode induktif. Metode yang berasal dari temuan-temuan berbentuk konsep, teori dikembangkan dari teori yang telah ada. Proses induktif berasal dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

---

<sup>17</sup> Bagong Suyanto-Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, h. 43.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung,: Alfabeta, 2010), h. 61.

## **BAB II**

### **HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK**

#### **MENURUT FIQH SIYASAH**

##### **A. Pengertian Suaka Politik dalam Fiqh Siyasah**

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan menyayangi pihak tertentu dengan cara memerhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya. Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan.

Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, kesuatu negara yang menjadi tujuannya.<sup>20</sup>

Suaka politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum. Kejahatan politik biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi.<sup>21</sup> Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas

---

<sup>20</sup>Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 223.

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 310.

dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik.

Piagam Madinah menjelaskan bahwa kaum yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak untuk dapat pertolongan dan santunan selama kaum mukmin tidak terzolimi dan tidak ditentang oleh mereka, dalam situasi ini kaum yahudi diperlakukan sama dengan kaum muslimin yang lainnya selama tidak merugikan dan tidak berkhianat<sup>22</sup>

Pada kasus *exodus* umat Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat dari Makkah ke Madinah menjelaskan adanya kesamaan dengan kriteria unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pengungsi pada masa kini yaitu adanya rasa takut yang sangat terhadap persekusi yang diberikan oleh penguasa di tempat asal mereka, dengan alasan ras, agama, dan sebagainya. Beberapa contoh di atas adanya ide perlindungan di negara mereka. Dalam Al-Qur'an prinsip suaka (*asylum*) diatur secara jelas dalam Surah Ibrahim dan Surah At-taubah. Di sebutkan dalam Surah Ibrahim (14) ayat 35.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَ

Artinya: *dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a, "ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.*

Terlihat bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan agar masjid yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail, yang kemudian bernama Masjidil Haram di

---

<sup>22</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika,) h. 84-87.

Kota Mekkah, merupakan tempat yang aman (*asylum*) bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Masjid merupakan tempat yang suci dan rumah Tuhan, sehingga tidak ada kekerasan terhadap mereka-mereka yang mencari perlindungan di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (kebebasan) ayat 6 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Pada mulanya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 6 berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa Pra-Islam yang kemudian diresepsi dalam ajaran Islam karena dianggap tidak bertentangan, yaitu untuk memberikan perlindungan (*Asylum*) terhadap orang asing selama tiga hari. Kemudian tradisi ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan pada waktu terjadi peperangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 6.<sup>23</sup>

Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik bermula dari pembagian antara dua negara (dunia), yaitu *dar al-harb* dan *dar al-Islam*. Di samping itu, mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan

---

<sup>23</sup>Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003), h. 59-60.



internasional. Dari pembahasan mereka tentang hal ini, ulama kemudian merumuskan pendapat mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke *dar al-Islam*.<sup>24</sup>

Prinsip Islam tidak menghalangi pendudukan dari *dar al-harb* untuk minta perlindungan (suaka) ke *dar al-Islam*. Keizinan untuk mendapat suaka dari *dar al-Islam* hanya berlaku untuk beberapa waktu tertentu saja. Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa lamanya waktu mereka boleh menetap di *dar al-Islam*. Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa keizinan tinggal bagi pemohon suaka hanya berlaku selama setahun saja. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa mereka diizinkan tinggal di *dar al-Islam* selama empat bulan saja, kecuali bila kepala negara memandang perlu untuk memperpanjang izin tinggalnya. Sementara Malik berpendapat bahwa keizinan tinggal mereka tidak di batasi oleh waktu.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemberian suaka bisa dibedakan kepada dua bentuk, yaitu jaminan keamanan yang tetap (*mu'abbadah*) sebagaimana pendapat Malik dan yang sementara (*mu'aqqatah*). Seperti pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad ibn Hanbal. Pencari suaka yang menetap hanya sementara adalah orang-orang non-muslim. Merekalah yang mendapat keizinan sementara untuk tinggal di *dar al-Islam*. Setelah habis waktunya, mereka dapat meninggalkan *dar al-Islam*. Bahkan kepala negara berhak mempercepat izin tinggal mereka sebelum habis

---

<sup>24</sup>Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 312.

waktunya kalau memang dipandang perlu. Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman.

Sedangkan warga negara lain yang muslim yang berlindung ke *dar al-Islam* dapat menetap untuk selamanya, karena ia dianggap sebagai warga negara *dar al-Islam*. Demikian pula halnya dengan orang non-Islam yang mencari perlindungan di *dar al-Islam* dan kemudian masuk Islam. Dengan permohonan suakanya ke *dar al-Islam* dan berpindahya ia ke agama Islam, maka statusnya pun berubah menjadi warga negara *dar al-Islam*, bukan lagi *musta'min*. Ia harus diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya harus dilindungi.

Mereka yang mendapat suaka dari *dar al-Islam* harus dilindungi keselamatan jiwa dan hartanya dari gangguan dalam maupun luar negeri. Sebagai imbangannya, ia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di *dar al-Islam*. Tentang hal ini semua ulama sepakat berpendapat demikian. Namun dalam hal apa saja yang harus mereka patuhi, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpandangan bahwa mereka bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam masalah *mu'amalah maliyah* (hubungan antara sesama manusia yang bersifat kebendaan), jumhur ulama menetapkan bahwa mereka harus mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku dalam *dar al-Islam*. Mereka tidak boleh melakukan praktek riba, menipu dan perilaku bisnis lainnya yang tidak dibenarkan agama Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 313.

Penyerahan pelarian politik ini, juga terdapat perbedaan antara penyerahan ke *dar al-Islam* dan ke *dar al-harb*. Kalau yang memohon ekstradisi adalah negara Islam juga, maka ia dapat diserahkan kembali ke negara asalnya. Penyerahan ini tidak memandang apakah pelarian itu muslim atau bukan. Akan tetapi, kalau negara yang memohon adalah *dar al-harb*, maka pelarian tersebut tidak boleh dikembalikan ke *dar al-harb*. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang umat Islam mengembalikan wanita-wanita muslimah yang meminta suaka kepada *dar al-Islam* (Negara Madinah) ke *dar al-harb*, walaupun mereka memiliki keluarga disana.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ  
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ  
وَلَيْسَ لَكُمُ الْحُكْمُ ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka.

Menurut teori fiqh siyasah setiap negara yang termasuk *dar al-Islam* di pandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam. Telah dijelaskan bahwa hukum Islam mengikat umat Islam secara perorangan, tidak mengikatnya menurut daerah tempat tinggalnya. Namun demikian umat Islam diharuskan tinggal di daerah tertentu. Jadi hukum harus memperhatikan hubungan antara umat Islam perorangan dengan daerah tempat tinggalnya. Hukum Islam tidak mengatur dan menentukan kedudukan umat Islam berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya, tetapi mengatur tentang kedudukan daerah tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat Islam. Dengan begitu kedudukan suatu daerah menurut hukum tidak semata-mata bergantung pada pengakuan bahwa daerah tersebut merupakan daerah Islam tetapi pada pengakuan tentang status keagamaan penduduk tersebut, muslim atau bukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daerah yang penduduknya memberlakukan hukum Islam disebut *dar al-Islam*.

Meskipun menurut hukum Islam hanya umat Islam saja yang memiliki hak penuh sesuai hukum yang berlaku, tetapi golongan umat yang beragama lain dapat menuntut perlindungan hukum dari para pembesar Islam, jika mereka mendapat izin untuk daerah Islam. Menurut hukum Islam, seorang muslim mempunyai hak penuh sebagai penduduk. Mereka yang beragama lain hanya mempunyai beberapa hak tertentu saja, tergantung pada hubungan baiknya dengan umat Islam. Mereka yang tidak mempunyai hak penuh dalam hukum terdiri dari tiga golongan yaitu kaum *harbi*, kaum *musta'min* dan kaum *zhimmi*.

Seorang *harbi* baik dari golongan *ahl al-kitab* atau golongan musyrik dipandang sebagai penduduk *dar al-harb*, tidak peduli negeri asalnya. Karena menurut hukum Islam *dar al-harb* termasuk dalam keadaan perang melawan *dar al-Islam*, maka seorang *harbi* adalah orang asing dan umat Islam berada dalam keadaan perang melawannya. Jika orang *harbi* tersebut seorang musyrik maka orang Islam dapat membunuhnya, jika orang *harbi* itu dari golongan *ahl al-kitab* maka ia tidak dibunuh tetapi cukup ditawan atau dijadikan budak. Seorang *harbi* boleh memasuki *dar al-Islam* jika telah memperoleh ijin yang disebut *aman*. Ia boleh bepergian melintasi *dar al-Islam* atau tinggal di situ bersama keluarga dan harta bendanya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. *Aman* adalah jaminan keamanan yang diberikan kepada seorang *harbi* sehingga ia memperoleh perlindungan dari pemerintah Islam selama berada di *dar al-Islam*. *Aman* diberikan kepadanya selama berada di *dar al-Islam*. *Aman* diberikan kepadanya selama tidak dalam keadaan perang melawan umat Islam, sehingga dia menjadi seorang *mustamin* (orang yang dijamin keselamatannya). *Aman* itu hanya berlaku untuk satu tahun saja. Jika seorang *harbi* minta jaminan yang berlaku lebih dari satu tahun maka ia harus membayar pajak dan menjadi orang *zhimmi*.

*Aman* yang tidak boleh diberikan kepada kaum *harbi* atas permintaan dari seorang Islam yang sudah dewasa, baik orang merdeka atau budak, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi para ulama hukum aliran Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa para budak, baik laki-laki atau perempuan berhak memberi *aman*. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, anak boleh memberi aman jika sudah cukup umurnya. Auzai berpendapat bahwa anak-anak yang berumur sepuluh

tahun berhak memberi aman. Adapun semua madzab tidak mengizinkan golongan *zhimmi* untuk memberi aman.<sup>26</sup>

Apabila seorang *harbi* menjadi orang *mustamin* maka diperbolehkan membawa keluarga dan anak-anaknya, mengunjungi semua kota di *dar al-Islam* (kecuali kota-kota suci di Hijaz), tinggal di *dar al-Islam* selamanya, serta menikah dengan seorang perempuan dari golongan *zhimmi* dan membawanya pulang ke *dar al-harb* selama *aman* berlaku baginya (namun ini tidak berlaku bagi perempuan, seorang perempuan *harbi* yang menikah dengan seorang laki-laki dari golongan *zhimmi* tidak diperbolehkan membawa suaminya pulang ke *dar al-harb* karena dikhawatirkan tenaga laki-laki itu dapat dipergunakan untuk bertempur melawan umat Islam).<sup>27</sup>

Masalah suaka politik yakni pengusiran dan pengasingan penjahat perlu dibedakan antara penjahat, penjahat dari penduduk negeri *dar- al-Islam* dan penjahat dari penduduk negeri *dar al-Kuffar*. Penjahat dari orang-orang muslim atau orang *zhimmi* penduduk *dar- al-Islam* menurut kaedah pokok hukum Islam mereka tidak boleh diusir atau diasingkan. Terhadap mereka dibiarkan menetap di negeri kediamannya sendiri maupun di daerah lain dari negeri *dar- al-Islam*.

Selain itu apakah penguasa *dar- al-Islam* demi terjadinya keamanan dan ketertiban umum dapat dibenarkan mengusir, bahkan mengasingkan orang-orang yang bukan rakyat sendiri, baik muslim atau *zimmi* dengan mengembalikan ke negara asal mereka, atau diasingkan kesatu negeri lain. Problem semacam kaedah fiqhiyah, dinamakan darurat. “*al darurat tubihu al imahdurat wa qimatuha*

---

<sup>26</sup> Masjid khadduri, *Islam Agama Perang?*, (Yogyakarta: Karunia Indah, 2004), h. 125-127.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 129.

*biqadратиha*”. Yang artinya adalah bahwa segala keadaan yang darurat mengharuskan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang dilarang, dan tolak ukur penilaian darurat diukur menurut ukuran kondisinya. Maksudnya ialah bahwa kita dibolehkan melakukan sesuatu diwaktu darurat atau sesuatu yang dalam keadaan biasa atau normal sebenarnya tidak boleh dilakukannya dan dibolehkan melakukannya dengan catatan tidak melampaui batas-batas kondisi yang diperlakukan.<sup>28</sup>

Keadaan darurat dan keperluan yang sangat mendesak merupakan dua kaedah pokok yang sangat menentukan dalam penyimpangan hukum pada umumnya. Dengan berpegang kepada dua kaedah hukum pokok itu maka dalam keadaan darurat bagi antar negara *dar- al-Islam* boleh mengadakan peraturan-peraturan yang mengikat untuk seseorang yang akan memasuki daerah-daerah yang dikuasai pemerintahnya sekedar demi terpeliharanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Boleh juga dalam keadaan darurat itu bagi antar negara *dar- al-Islam* mengusir, bahkan mengasingkannya seseorang muslim atau *zhimmi* dari daerahnya, apabila untuk keperluan menolak keadaan darurat itu dipandang tidak ada jalan lain yang dapat dilampaui hanyalah dengan cara mengusir atau mengasingkannya dan cara pengusiran atau pengasingan itu boleh dengan jalan mengembalikannya ke negeri asalnya, atau kesalah satu negeri *dar- al-Islam*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>L.Amin widodo, *Op.Cit*, h. 38.

<sup>29</sup>Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 43.



## **B. Ketentuan Hukum dalam Fiqh Siyasah tentang Suaka Politik**

Secara prinsipil, perlindungan terhadap pengungsi berhubungan dengan mereka yang memenuhi persyaratan kualifikasi pengungsi, atau yang dikenal dengan “pengungsi beritikad baik”, menurut syariat Islam ada beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh pengungsi atau para pencari suaka, berikut akan dijabarkan beberapa ketentuan-ketentuannya :

### **1. Syarat-syarat Memperoleh Suaka**

Tujuan akhir dari pemberian suaka ialah adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi pengungsi yang tinggal diwilayah negara pemberi suaka.<sup>30</sup> Dalam kajian ketatanegaraan Islam, suaka politik diberikan kepada pihak peminta (pengungsi) dengan beberapa syarat berikut:

- a. Pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam. Penyebutan negara Islam dalam hal ini merujuk pada wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam dan seluruh penduduknya, baik muslim maupun non-muslim, berada dalam perlindungan hukum yang didasarkan pada doktrin Islam. Abu Hanifah menyebutkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi Negara Islam, yaitu aturan-aturan yang ditegakkan bersumber dari syariat, bertetangga baik dengan negara-negara Islam lainnya, dan penduduknya diatur berdasarkan ajaran Islam. Kalangan ahli hukum aliran Maliki menyebutkan bahwa negara Islam adalah negara yang memberlakukan aturan Islam dalam sistem hukumnya. Adapun

---

<sup>30</sup>Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), h. 27.

kalangan ahli hukum mazhab Syafi'i adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menegakkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Sementara itu, kalangan ahli hukum mazhab Hanbali menyebutkan bahwa Negara Islam adalah negara yang sistem hukumnya didominasi oleh aturan-aturan yang berasal dari syariat Islam.

- b. Motif mendapatkan suaka politik. Suaka politik diberikan kepada seseorang atau kelompok yang sengaja ingin mencari perlindungan politik dari negara yang ditujunya, dalam hal ini, pencari suaka bukan seseorang atau sekelompok orang yang dikategorikan pengungsi, melainkan orang atau kelompok yang dengan sengaja mengajukan menjadi warga negara yang dituju.
- c. Pencari suaka tidak memungkinkan lagi mendapatkan perlindungan dari negara asal. Selain tidak mungkin, pencari suaka menolak diberi tawaran oleh negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan.
- d. Pemberian suaka tidak merugikan negara yang menjadi tujuan, seperti seseorang yang meminta suaka akhirnya menjadi mata-mata bagi negara asalnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ija Suntana, *Op.Cit*, h. 224-225.

## 2. Etika Negara Tujuan Pencari Suaka

Etika Negara tujuan tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 9  
yaitu:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي  
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin) dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung*

Terdapat empat etika dasar negara tujuan terhadap para pencari suaka,  
yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Negara tujuan harus bersikap senang dan gembira atas kedatangan para pencari suaka dan memperlakukan mereka secara baik.
- b. Memerhatikan kebutuhan hidup mereka secara layak dan diutamakan.
- c. Memperlakukan secara setara terhadap setiap pendatang yang mencari suaka tanpa membedakan berdasarkan pertimbangan ras, kekayaan, agama, atau yang lainnya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 226.

- d. Terlarang memberikan penolakan terhadap para pencari suaka dari negara-negara yang terkena krisis dan kelaparan.

### **3. Aturan Utama Suaka Politik**

#### **a. Larangan Pemulangan**

Pemulangan atau pengembalian pencari suaka yang masuk ke negara asalnya yang kondisi dan situasinya mengancam jiwanya dilarang secara keras dalam syariat Islam. Karena terlarangnya memulangan pencari suaka yang terancam keselamatan jiwanya, Al-Syaibani berpendapat bahwa wajib melawan negara yang mengancam melakukan tindakan melakukan tindakan militer agar pencari suaka diekstradisi ke negara asalnya.

#### **b. Larangan menangkap Pengungsi Ilegal**

Pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke negara tujuan secara ilegal dilarang ditangkap dan dipenjara. Hukum asal tinggal bagi warga asing adalah terlarang kecuali ada izin resmi terlebih dahulu. Izin tinggal untuk orang asing (visa) merupakan hal yang tidak diharuskan bagi mereka yang datang ke suatu negara tujuan karena dalam rangka mencari suaka akibat ancaman keselamatan mereka di negara asalnya.

Menurut para ahli tata Negara Islam terdapat empat jenis manusia yang diperbolehkan masuk ke suatu negara tanpa izin (visa) untuk tinggal:

1. Duta besar dan pedagang
2. Orang yang menurut kebiasaan harus dibebaskan
3. Seorang yang diutus khusus oleh satu negara (delegasi)

#### 4. Orang yang meminta perlindungan keamanan dan keselamatan

##### c. Larangan Diskriminasi

Suaka politik diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya. Perbedaan merupakan fakta alami (kodrat alam) yang secara sengaja diciptakan oleh Tuhan, namun bukan untuk dipilah-pilah atau dipilih-pilih, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 22:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۖ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاٰخَتَلَفَ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوٰنِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui*

##### d. Fleksibilitas Aturan

Hukum suaka politik memiliki karakter hukum interaksi manusia dengan manusia (*muamalah*), yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu, kaidah hukum *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman* (perubahan hukum akibat perubahan kondisi) menjadi pegangan negara tujuan dalam memperlakukan pengungsi. Selain itu, hadis nabi yang menyatakan, “kalian lebih tahu urusan dunia kalian”, harus di pertimbangkan sebagai pegangan mengatur pengungsi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 227-228.

#### 4. Macam-macam Suaka

##### a. Suaka Agama

Suaka agama adalah pemberian perlindungan bagi setiap orang yang memasuki tempat-tempat keagamaan atau suci. Secara konsep, suaka agama dalam ketatanegaraann Islam diberikan untuk dua bentuk, yaitu suaka untuk mendengarkan Al-Qur'an dan memasuki Masjid Suci Mekah.

##### b. Suaka Teritorial

###### 1) Pemberian Suaka oleh Negara

Otoritas suatu negara memiliki wewenang untuk memberi suaka di wilayahnya. Suaka diberikan kepada pihak atau seseorang yang mengajukan suaka kepada negara atas pertimbangan keamanan. negara tujuan berhak melindungi pihak peminta suaka dan menahannya dari permintaan pengembalian oleh negara asal.

###### 2) Pemberian Suaka oleh Individu

Pemberian suaka dapat diberikan oleh seseorang individu, sebagaimana tertera dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya: *Orang-orang muslim itu setara dalam darah. Orang yang paling rendah sekalipun dapat memberi jaminan kemanan dan mereka memberi suaka, serta bersatu melawan musuh.*

#### c. Pemberian Suaka Kepada Sandera

Seorang sandera berhak mendapatkan suaka politik dan negara berkewajiban memberinya, ketika sang sandera menyatakan diri berafiliasi dengan pihak yang menyanderanya. Seorang sandera tidak boleh diekstradisi ke negara asalnya apabila ia akan dibunuh oleh negara asal. Walaupun sandera meminta diekstradisi, namun nyawanya terancam di negara asal maka dilarang mengembalikan sandera ke negara asal.

#### d. Pemberian Suaka Kepada Imigran

Orang yang melakukan imigrasi ke suatu negara tujuan wajib diberi perlindungan (suaka). Beberapa aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut:

- 1) Dilindungi sisi keamanan keimanannya
- 2) Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal harus mendapat perlindungan prioritas
- 3) Ekstradisi imigran boleh dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya

#### e. Suaka untuk Korban Konflik Senjata di Negara Asal

Suaka diberikan kepada siapapun yang mengajukan akibat peperangan di negara asalnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Konflik bersenjata mengakibatkan warga mengungsi
- 2) Suaka tidak diberikan kepada pihak yang terlibat konflik
- 3) Korban konflik tidak mengajukan perpindahan tempat

- 4) Korban konflik segera dipulangkan ke negara asal setelah konflik senjata berakhir

f. Suaka Diplomatik

Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan oleh suatu negara kepada pihak-pihak tertentu yang kedudukannya sebagai petugas misi suatu negara untuk kepentingan yang telah disepakati oleh negara tujuan dan negara asal. Suaka wajib diberikan oleh negara tujuan kepada seseorang diplomat dalam batasan-batasan sebagai utusan negara asal. Suaka dapat diberikan sebagai suaka dalam negeri, yaitu pemberian jaminan keamanan. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan perlindungan penuh kepada utusan-utusan diplomatik yang datang kepadanya sehingga keselamatannya merupakan tanggungjawab-Nya sebagai kepala negara.

Terkait dengan suaka politik luar negeri, bagi seorang diplomat yang meminta suaka politik aturan dalam ketatanegaraan Islam menyatakan bahwa tidak boleh mengabulkan permintaan suaka dari seseorang diplomat sebelum terdapat kepastian dari negara asalnya tentang keadaannya. Apabila benar secara objektif kondisi sang diplomat di negara asalnya terancam maka negara tujuan berhak memberikan suaka.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 228-230.



## **C. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Hak-hak Penerima Suaka Politik**

### **1. Hak dan Kewajiban Pencari Suaka**

Hak terpenting pencari suaka di negara tujuan adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat fisik dan materil, yaitu makan, minum, dan pakaian. Sementara itu, kewajiban pencari suaka adalah menaati peraturan yang berlaku di negara tujuan, sekalipun berbeda dengan negara asalnya.

Terdapat beberapa hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### **a. Pengamanan harta benda**

Harta kekayaan para pencari suaka harus dapat pengamanan dari pihak negara tujuan agar tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, termasuk sesama pencari suaka. Bagian dari aturan harta benda para pencari suaka adalah agar dilarangnya mereka dari menggunakan harta bendanya secara sembarangan.

#### **b. Penyatuan keluarga**

Para pencari suaka berhak disatukan dengan kerabat-kerabatnya. Peyatuan ini merupakan kewajiban negara asal, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa memisah-misahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat”.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 230-231.

c. Perlindungan khusus untuk anak-anak

Keturunan atau anak-anak para pencari suaka mendapatkan hak-hak anak dari negara tujuan sehingga mereka diberikan hak-hak yang diberikan kepada anak-anak di negara tujuan. Di antara hak anak, selain hak pokok, adalah mendapat pendidikan, mendapatkan fasilitas tumbuh kembang, dan hak-hak lain yang melekat pada anak-anak.

d. Kebebasan berkeyakinan dan beribadah

Para pencari suaka harus diberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan akidah masing-masing. Negara tujuan berkewajiban menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan para pencari suaka. Dalam hal ini negara tujuan berkewajiban menyediakan tempat-tempat ibadah bagi para pencari suaka.

e. Tempat tinggal yang layak

Para pencari suaka, seperti para pengungsi, berhak mendapatkan tempat tinggal (pengungsian) yang layak, seperti tersedia tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan sarana-sarana yang dibutuhkan lainnya.

f. Mendapatkan perlindungan hukum yang adil

Para pencari suaka harus dilindungi dari tindakan-tindakan zalim pihak lain di negara tujuan. Apabila terjadi sengketa perdata antara pihak pencari suaka dengan penduduk negara tujuan, pengadilan setempat wajib memperlakukan mereka secara adil.

## **2. Larangan Pemberian Suaka**

### **a. Suaka kepada Pelaku kejahatan Non-politik**

Suaka terlarang diserahkan seseorang atau kelompok yang secara jelas sebagai pelaku tindak kejahatan, yaitu kejahatan yang hukumannya sudah pasti, seperti: pencurian, pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Doktrin ketatanegaraan Islam melarang keras pemberian suaka kepada pelaku kejahatan korupsi, sehingga koruptor distatuskan sebagai pelaku kejahatan yang tidak dapat dilindungi oleh siapapun. Orang atau negara yang melindungi koruptor dapat di statuskan sebagai pihak yang terlibat dalam kejahatan. Suatu negara dapat dituntut sebagai pelaku kejahatan internasional apabila memberikan suaka kepada buronan korupsi suatu negara.

### **b. Suaka kepada Pelaku Kejahatan yang Disepakati dalam Perjanjian Internasional**

Suaka terlarang diberikan kepada orang atau kelompok yang termuat dalam nota perjanjian internasional, yang secara hukum tidak bertentangan dengan kebenaran universal (syariat). Nabi Muhammad SAW melarang keras kepada setiap penduduk Madinah untuk memberikan perlindungan kepada orang atau pihak yang dalam perjanjian dengan pihak luar disebut untuk tidak dilindungi dan tidak bertentangan dengan syariat. Sehubungan dengan itu, suatu negara berkewajiban mengekstradisi seseorang atau kelompok yang datang mencari suaka karena telah terikat perjanjian internasional dengan negara asal.

### 3. Penghentian Suaka

Suaka dihentikan atau dicabut karena tiga hal berikut:<sup>36</sup>

- a. Diterimanya pencari suaka sebagai warga negara tujuan

Hak-hak yang diterima sebagai pengungsi berubah dari orang yang bersangkutan menjadi hak-hak sebagai warga negara. Pencari suaka yang telah berubah kewarganegaraannya menjadi warga negara tujuan mendapatkan hak utuh sebagai warga negara, tidak lagi sebagai pengungsi, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, maupun pengamanan. Pebiaran pencari suaka yang telah menjadi warga negara tujuan sebagai pengungsi merupakan tindak kezaliman dan penelantaran.

- b. Tindakan Berbahaya pencari suaka

Suaka dapat dihentikan kepada seseorang atau sekelompok pencari suaka yang melakukan tindakan berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan oleh suatu kelompok maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka secara jujur. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfal: 58).

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*

---

<sup>36</sup>Ibid, h. 233

### c. Permintaan Penghentian Suaka

Suaka dapat dihentikan atau dicabut karena pihak pencari suaka sudah tidak memerlukan suaka dari suatu negara. Setelah perjanjian Hudaibiyyah ditanda tangani, Utsman bin Affan dengan sejumlah orang pergi ke Makkah dan ditangkap oleh sekelompok orang Quraisy. Lalu Walid bin Al-Mughirah memberikan perlindungan (suaka) kepada Utsman. Tidak lama setelah itu Utsman menyatakan kepada Al-Walid agar dirinya dilepas dari suaka Al-Walid. Akhirnya, Al-Walid melepaskan suaka dan meminta agar Utsman mengumumkannya di dalam Masjidil Haram, seperti Al-Walid mengumumkan pemberian suaka kepadanya.

### **BAB III**

## **HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

### **A. Pengertian Suaka Politik dalam Hukum Internasional**

Suaka berasal dari bahasa Yunani “*Asylon*” atau “*Asylum*” dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung. Masalah permintaan suaka ini dan pemberian suaka bukanlah muncul pada beberapa tahun ini saja.<sup>37</sup> Masalah ini sama tuanya dengan sejarah kelahiran umat manusia atau dengan kata lain praktek permintaan dan pemberian suaka ini sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi tidak hanya ada pada zaman sekarang tetapi di zaman primitif pun suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Kadang-kadang dikalangan suku primitif ada seseorang meninggalkan sukunya atau kampung halamannya untuk memohon perlindungan pada suku lain.

Enny Soeprapto mengatakan: Masyarakat Yunani purba telah mengenal lembaga yang disebut “*asylia*” walaupun agak berbeda maksud dan pengertiannya dengan “suaka” yang kita kenal sekarang. Pada masa Yunani purba itu, agar seseorang, terutama pedagang, yang berkunjung ke negara-negara lainnya, mendapat perlindungan, maka antara sesama negara kota di negeri itu diadakan perjanjian-perjanjian untuk maksud demikian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Sulaiman Hamid, *lembaga Suaka dalam Hukum Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 43.

<sup>38</sup>Enny Suprpto, *Makalah Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*, (Jakarta:1982), h. 20.

Lembaga “*Asyilia*” itu kemudian dilengkapi dengan lembaga yang disebut “*asphalia*” yang tujuannya melindungi benda-benda milik orang yang dilindungi menurut lembaga “*Asyilia*”. Dalam perkembangan sejarah kemudian mengenal kebiasaan dimana rumah-rumah ibadat seperti gereja, merupakan tempat-tempat suaka. Demikian pula rumah-rumah sakit sering dipandang sebagai tempat suaka. Dimasa-masa awal Masehi, suaka berarti suatu tempat pengungsian atau perlindungan terhadap orang yang peribadatnya dihina.<sup>39</sup>

Untuk waktu yang lama, suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya, terlepas dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pencari suaka yang menyebabkannya dikejar-kejar. Dalam waktu yang lama pelaku tindak pidana biasa pun, yang mendapatkan suaka di negara lain, tidak di ekstradisikan. Keadaan ini baru berubah pada abad ke-17, dimana berbagai pakar hukum, termasuk seorang yuridis Belanda yang terkenal Grotius, menggariskan perbedaan antara tindak pidana politik dan tindak pidana biasa dan menyatakan bahwa suaka hanya dapat diklaim oleh mereka yang mengalami tuntutan (*prosecution*) politis atau keagamaan.

Sejak pertengahan abad ke-19 bagian besar perjanjian ekstradisi mengakui prinsip non-ekstradisi bagi tindak pidana politik, kecuali yang dilakukan terhadap kepala negara. Secara devinitif belum ditemui adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat universal yang menentukan status “pesuaka” (*asylee*). Tidak ada yang menentukan secara hukum pengertian tentang “suaka” dan atau “pesuaka”. Demikian pula dengan batasan “pencari suaka” (*asylum-seeker*) tidak

---

<sup>39</sup> Sulaiman Hamid, *Op. Cit*, h. 44.

diketahui dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat universal atau regional yang berkaitan dengan masalah lembaga suaka.

Sebagai pedoman kita dapat berpegangan kepada “Pasal 1 Paragraf 3 Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 bahkan secara tegas menyatakan bahwa penilaian alasan-alasan bagi pemberi suaka diserahkan kepada negara pemberi suaka.

Dr. Kwan Sik, SH, mengatakan suaka adalah perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan lain atau oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberi suaka). Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.<sup>40</sup>

Charles de Visser dalam bukunya “*Theory and reality in public international law*” mengatakan suaka adalah sesuatu kemerdekaan dari suatu negara untuk memberikan suatu suaka kepada seseorang yang memintanya. Gracia Mora dalam bukunya “*International Law and Asylum As Human Right*” mengatakan suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang melawan negara asalnya. Prof. Dr. G. Sugeng Istanto, S.H., mengatakan bahwa *Asylum* merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut dikediaman perutusan asing atau dikapal asing. Dengan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 45.



adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain.<sup>41</sup>

Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa suaka adalah dimana seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.<sup>42</sup>

J.G. Starke menegaskan pula bahwa konsepsi suaka dalam hukum internasional adalah mencakup dua unsur yaitu:

- a. Pernaungan yang lebih dari pada pelarian sementara sifatnya.
- b. Pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai daerah suaka secara aktif.

Dari pengertian-pengertian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya. Perlindungan yang diberikan kepada pencari suaka oleh negara dimana si individu tadi memohon agar terhindar dari “penyiksaan” negara asal si pemohon.

‘ Kekuasaan negara untuk memberikan suaka *asyl* kepada seorang bertalian dengan kekuasaannya untuk menolak penyerahan, ternyata pada pemberian suaka

---

<sup>41</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1994), h. 146.

<sup>42</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 163.

kepada penjahat-penjahat politik, yang pada umumnya tidak diserahkan. Suaka berakhir dimana penyerahan dimulai.<sup>43</sup> Menurut UNHCR seorang pencari suaka adalah seorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka. Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan alasan-alasan yang melatar belakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Jadi yang dimaksud pencari suaka disini adalah orang-orang yang meminta perlindungan dan mengajukan permohonan kepada UNHCR untuk menjadi pengungsi.<sup>44</sup> Menurut hukum internasional suaka dan pengungsi sebenarnya memiliki perbedaan. Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban yang telah ditetapkan serta diakui oleh hukum internasional atau nasional.

Melihat uraian-uraian diatas, maka kita dapat menarik pengertian dari beberapa istilah yang diatas yang tentunya tidak sama, yaitu:

1. Suaka (*asylum*), yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan

---

<sup>43</sup> C.S.T. Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 339.

<sup>44</sup> Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.24-25.

mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya.

2. Pesuaka adalah orang yang mencari suaka atau perlindungan, biasanya orang tersebut meminta perlindungan kepada pemerintah negara lain atau keluar wilayah negaranya karena berbagai sebab yang terjadi pada dirinya, dan mengakibatkan dia merasa tidak aman dan terancam jiwanya.<sup>45</sup>
3. Pengungsi (*refugee*) yaitu orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar mengalami persekusi (*persecution*) dan tak mungkin kembali lagi.<sup>46</sup>

Suaka teritorial (atau *intern*), yaitu suaka yang diberikan dalam wilayah negara, atau ekstrateritorial, yaitu yang diberikan dalam gedung perwakilan, gedung-gedung konsuler, lembaga-lembaga internasional, kapal perang, serta kapal dagang. Perbedaannya adalah bahwa kekuasaan memberikan suaka teritorial merupakan atribut kedaulatan teritorial, sedangkan pemberian suaka ekstrateritorial mengesampingkan kedaulatan teritorial karena negara teritorial tidak dapat menghukum pelarian yang telah menikmati perlindungan. Sesuai dengan perbedaan ini, maka terdapatlah asas umum bahwa setiap negara berhak memberikan suaka teritorial, kecuali negara itu telah mengadakan pembatasan khusus mengenai suatu teritorial, sedangkan hak untuk memberikan suaka teritorial merupakan perkecualian dan harus ditentukan untuk setiap perkara. Persamaannya adalah bahwa kedua bentuk suaka tersebut merupakan persesuaian

---

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 24.

<sup>46</sup>Sulaiman Hamid, *Op.Cit*, h. 47.

antara tuntutan-tuntutan hukum sesuatu negara berdaulat dengan tuntutan-tuntutan prikemanusiaan.<sup>47</sup>

Kebebasan negara untuk memberikan suaka dalam wilayahnya, sudah berasal dari zaman purbakala, dan meliputi tidak hanya pelarian-pelarian politik, sosial atau keagamaan, tetapi juga semua orang asing, termasuk penjahat-penjahat kriminal, kebebasan itu hanyalah satu aspek dari pada kekuasaan umum negara untuk mengizinkan atau mengeluarkan orang dari wilayahnya. Tetapi biasanya seorang bukan warga negara teritorial, yang ditahan di atas kapal asing dalam laut teritorial negara itu, tidak akan diberikan suaka oleh negara teritorial itu. Masih merupakan masalah yang dipertengkarkan apakah penjahat-penjahat perang dapat diberikan suaka. Sering kali dikatakan bahwa seorang pelarian mempunyai “hak suaka”. Ini tidak benar, karena kaum pelarian tidak mempunyai hak yang dapat dipaksakan (*enforceable right*) dalam hukum internasional mengenai suaka, baik izin akan suaka maupun penyerahan terhadap negara yang menuntutnya. Satu-satunya hak hukum internasional dalam hal ini adalah hak negara untuk memberikan suaka.

Beberapa sistem hukum nasional, misalnya konstitusi Perancis dan Italia memang memberikan hak kepada kaum pelarian, dan juga suatu konferensi yang tidak mengikat, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*, 1948 pasal 14. Tetapi selama ini hak itu tidak terjamin oleh hukum internasional, sekalipun usul-

---

<sup>47</sup>C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 343.

usul untuk mengakui hak itu sudah dipertimbangkan oleh PBB. Kebebasan negara untuk memberikan suaka dapat ditiadakan dengan traktat penyerahan.<sup>48</sup>

Hukum internasional modern tidak mengakui adanya hak kepala perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung perwakilannya. Malah pemberian itu rupa-rupannya dilarang oleh hukum internasional, karena akibatnya membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dan keadilan oleh negara teritorial. Ketiadaan hak suaka diplomatik seperti ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara *Asylum Case* yang mempersoalkan penerapan aturan-aturan hukum internasional Latin –Amerika mengenai suaka diplomatik.

Mahkamah berpendapat jikalau suaka telah diberikan di gedung-gedung perwakilan tanpa pembenaran, kepala perwakilan tersebut tidak wajib menyerahkan pelarian kepada penguasa-penguasa setempat, jika tidak ada trakta-trakta yang mengharuskannya. Suaka dapat diberikan dalam gedung-gedung perwakilan sebagai pengecualian dalam hal-hal berikut:

1. Sebagai tindakan sementara, terhadap individu yang terancam bahaya massa, atau bahaya korupsi politik yang ekstrim. Pembenaran pemberian suaka dalam hal ini, ialah karena dengan demikian bahaya yang mengancam dapat dielakkan.
2. Jika ada kebiasaan setempat yang sudah lama diakui memperkenankan suaka diplomatik.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, 343-344.

3. Karena diperbolehkan dalam traktat antara negara teritorial dengan negara yang diwakili itu.

*Headquarters Agreement* PBB dan *Specialised agencies* tidak memperkenankan lembaga-lembaga internasional memberikan suaka ataupun pernaungan di gedung-gedungnya, malah tidak dapat memberikan perlindungan diatas dasar-dasar humaniter bagi penjahat-penjahat. Tetapi sulit dipikirkan bahwa lembaga-lembaga itu tidak dapat memberikan pernaungan sementara dalam keadaan-keadaan berbahaya.

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan *jurisdiksi eksklusif* diwilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Hakim Huber mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Dua ciri tersebut yaitu: pertama, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. Kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.

Suatu negara tidak dapat melaksanakan *jurisdiksi eksklusifnya* keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Pada prinsipnya suatu negara hanya dapat melaksanakannya secara eksklusif dan penuh

di dalam wilayahnya saja. Karena itu pula suatu negara yang tidak memiliki wilayah, tidaklah mungkin menjadi suatu negara.<sup>49</sup>

## **B. Ketetapan Hukum Internasional tentang Perlindungan bagi Pencari Suaka Politik**

Dari praktek-praktek Internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu sebagai berikut:

- a. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak.
- b. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya.
- c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya.
- d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka.
- e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukan pada asas timbal balik
- f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
  - 1) Larangan pengusiran (*non-expulsion*)
  - 2) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non-refoulement*), termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*), dan

---

<sup>49</sup>Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 111-112.

### 3) Non-ekstradisi pesuaka (*asylee*)

- g. Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain.
- h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tidak-tindak pidana non-politis dan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi:
  - 1) Tindak pidana biasa.
  - 2) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crimes*) tindak pidana menentang kemanusiaan (*crime against humanity*), sebagaimana dirumuskan dalam instrument-instrumen internasional yang bersangkutan.
- i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka, dan
- j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.<sup>50</sup>

Suaka dapat dibedakan menurut motifnya menjadi dua yaitu, suaka karena alasan politik dan suaka karena alasan keamanan.<sup>51</sup> Terdapat empat unsur

---

<sup>50</sup> Jurnal Hukum Unsurat, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, vol.XVIII/No. 1/Januari-April 2010, h. 7-9.



terjadinya suaka, yaitu adanya perlindungan dari negara lain, adanya negara yang memberikan suaka, adanya tempat/territorial memberi suaka, dan pemberian suaka ditujukan kepada seseorang penerima suaka.

Suaka dalam hubungan internasional dapat dibedakan menjadi suaka wilayah (*teritorialasylum*) dan suaka diplomatik (*diplomatic asylum* atau *extra-teritoal asylum*). Suaka wilayah atau suaka territorial adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Sebagai contoh, Negara Indonesia memberi suaka politik kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Sedangkan suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedaulatan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya. Contoh suaka ini adalah orang asing yang memasuki wilayah kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya. Contoh suaka ini adalah orang asing yang memasuki wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri, atau orang-orang Timor Timur yang memasuki gedung kedutaan besar asing di Jakarta.<sup>52</sup>

Suaka politik jenis pertama mendapat jaminan dalam hukum internasional. Setiap negara berhak memberikan perlindungan politik kepada warga negara asing. Negara asal pencari suaka tersebut hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian atau ekstradisi melalui saluran-saluran diplomatik. Sedangkan terhadap suaka politik jenis kedua (*diplomatic asylum*), hukum internasional tidak mengakui adanya hak kepala perwakilan suatu negara (duta besar) untuk memberi jaminan keamanan terhadap orang asing di gedung kedutaan besarnya, karena hal

---

<sup>51</sup>Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Op. Cit.*, h. 40.

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 310.

ini menyebabkan terbebasnya ia dari hukum dan kedilan di negara asalnya. Meskipun demikian, seorang kepala perwakilan asing tidak wajib menyerahkan orang yang minta suaka kepada pemerintah setempat, bila tidak ada perjanjian antara kedua negara yang mengharuskannya untuk menyerahkan pencari suaka tersebut (ekstradisi).<sup>53</sup>

Ada perbedaan prinsip dalam pemberian suaka ini. Dalam suaka teritorial, kekuasaan memberikan suaka merupakan hak dan atribut kedaulatan negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam suaka ekstrateritorial, kekuasaan memberikan suaka mengesampingkan kedaulatan teritorial negara. Artinya, seorang duta besar boleh memberikan perlindungan di gedung kedutaan besarnya kepada pemohon suaka, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kepala negaranya. Dalam hal ini ia berkuasa penuh menentukan layak tidaknya seseorang diberikan perlindungan.

Di samping dua suaka di atas, masih ada lagi satu bentuk suaka politik, yakni suaka netral (*neutral asylum*). Dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka tidak memasuki kedutaan asing atau lari ke suatu negara, tetapi ia memilih tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional, seperti perwakilan PBB di Jakarta, atau gedung sekretarian ASEAN. Ia meminta suaka kepada pejabat lembaga-lembaga tersebut.

Konsep suaka politik dalam hukum internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat terlebih dari pelarian dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka.

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 310-311.

Orang yang mendapat suaka politik secara prinsip tidak dapat dikembalikan ke negara lain, kecuali negara yang meminta pemulangannya (ekstradisi) tersebut mengemukakan alasan-alasan logis agar peminta suaka diserahkan kembali. Pengembalian pemohon ini juga dapat dilakukan apabila sebelumnya antara negara yang melindungi dan negara tempat pelariannya memiliki perjanjian ekstradisi.<sup>54</sup>

Masalah suaka pada hakikatnya menyangkut dua pengertian yaitu suaka teritorial dan diplomatik. Suaka teritorial menyangkut pada kewenangan negara untuk memperbolehkan pengungsi atau aktivis politik masuk atau tinggal dibawah negara tersebut yang juga berarti di bawah perlindungannya, karena itu memberikan suaka kepadanya, yang tidak asing lagi dalam hukum internasional.

Orang perorangan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan suaka. Namun sesuai dengan pasal 14 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi, ia dapat mencari suaka jika ada penuntutan dan jika disetujuinya dapat menikmatinya. Undang-undang Dasar Negara-negara tertentu menjanjikan tentang suaka politik kepada seseorang yang dituntut. Bagi negara yang memberikan suaka itu perlu menilai persoalannya kasus perkasus. Jika sesuatu tuntutan itu dapat dipahami, peraturan keimigrasian yang ada dan persyaratan-persyaratan biasanya dapat ditinggalkan. Negara asal pencari suaka yang telah melarikan diri ke negara lain tidak boleh menganggap bahwa penerimaan suaka dari negara lain

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 311.

tersebut sebagai tindakan bermusuhan, karena negara itu dalam memberikan suaka adalah dalam rangka melaksanakan hak kedaulatan teritorialnya.<sup>55</sup>

Berbeda dengan suaka teritorial, suaka diplomatik terjadi dalam hal perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing dapat mencegah penangkapannya secara paksa oleh penguasa setempat, tetapi saat ia meninggalkan gedung perwakilan asing tersebut, ia kehilangan perlindungannya. Perwakilan asing tidak mempunyai hak untuk menuntut agar seseorang yang telah diberikan suaka itu diberikan jaminan keamanan atau keselamatan untuk meninggalkan wilayah. Mungkin benar jika dikatakan bahwa suatu Kedutaan Besar dalam memberikan perlindungan itu (yang tidak lain kecuali untuk tujuan-tujuan perikemanusiaan) merupakan penyalahgunaan keistimewaan dari gedung perwakilan asing yang tidak dapat diganggu-gugat.

Hukum internasional tidak mengenal hak secara umum dari kepala perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, karena jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-undangan setempat dengan berbuat sekehendak hatinya dan akan melibatkan suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada.

Dalam hukum internasional, hak negara secara umum untuk memberikan suaka di dalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat berikan di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, h. 151.

1. Suaka dapat diberikan untuk jangka waktu sementara, kepada orang asing perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau dalam hal seseorang buronan yang dalam bahaya karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat.
2. Suaka dapat juga diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan mengikat.
3. Suaka dapat diberikan juga jika terdapat perjanjian khusus antara negara dimana penerima suaka berasal dan negara dimana terdapat perwakilannya.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, majelis umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu dapat ditolak atas dasar keamanan dari rakyatnya.
2. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui perantara dari negara-negara tertentu atau PBB.
3. Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian dan buronan, negara-negara lain haruslah menghormatinya.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 154-155.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 155

### C. Hak-hak bagi Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional

Konvensi Wina 1961 tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun pasal 41 (3) menyebutkan “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Perumusan dalam pasal 41 (3) tersebut dibuat sedemikian samar agar memungkinkan suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan.

Instrumen yang dapat diambil sebagai contoh misalnya, Konvensi Caracas 1954 yang memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan suaka di wilayah negara-negara pihak lainnya. Walaupun selama ini Konvensi Caracas yang merupakan satu-satunya perjanjian yang mengakui pemberian suaka, namun dalam prakteknya banyak negara yang melakukannya atas dasar hukum kebiasaan.<sup>58</sup>

Staffan Bodemar mengatakan, pasal 14 Universal Declaration of Human Rights mengakui bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman pereksekusian”. Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Kalau diperhatikan hukum internasional yang mengatur tentang pengungsian ataupun orang-orang yang memerlukan suaka (*asylum*) ini masih sangat lemah, dalam *Universal Declaration of Human Rights*

---

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 149.

pasal 14, kata-kata “menikmati” tidak jelas ukurannya. Namun kelihatannya dalam pasal 14 ayat 2 membatasi kata “menikmati” sejauh yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka perlindungan dapat dimintakan.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa meskipun hak seseorang atas suaka diakui oleh hukum internasional, namun hak tersebut bersifat terbatas hanya untuk mencari (*to seek*) dan untuk menikmati (*to enjoy*) suaka, bukanlah untuk mendapatkan (*to obtain*) ataupun untuk menerima (*to receive*) suaka. Sehingga, dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi negara untuk memberikan (*to grant*) suaka kepada seseorang pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam ketentuan diatas adalah pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (*in the exercise of its sovereignty*) dari negara. dengan demikian karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka negara pemberi suaka (*state granting asylum*) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (*origin state*) dari pencari suaka.

Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama, perlindungan internasional itu bertujuan menjamin HAM pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang

---

<sup>59</sup>Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsian Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Regional Representation, 2003), h. 61.

pengungsipun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia khawatir bakal mengalami persekusi.

Hak mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi atau bahaya harus diberi izin masuk di suatu negara, sekurang-kurangnya untuk waktu sementara. Salah satu komponen terpenting dalam lembaga suaka adalah prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini melarang negara-negara mengusir atau mengembalikan “seseorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya”.<sup>60</sup> Jika memakai alasan hukum tersebut, maka pencari suaka (*asylum-seeker*) harus diterima oleh negara dimana pencari suaka tadi telah memohonnya. Walaupun uraian ini bersamaan dengan masalah pengungsian, tapi kita dapat mengetahui bahwa pencari suaka dapat perlindungan internasional.

Pada prakteknya, ada semacam pengertian bahwa memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara. Dengan demikian suaka adalah hak negara, dan bukan hak individu yang memintanya. Karena itu, penerima suaka umumnya mengambil kewarganegaraan negara pemberi suaka. Kalaupun tidak, orang itu tetap mendapat fasilitas dan hak-hak yang sama dengan warga negara di negara barunya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak suara dalam pemilihan umum.

---

<sup>60</sup>Sulaiman Hamid, *Op.Cit*, h. 96.



Secara formal, pemberi suaka sebetulnya tak berbeda dengan pemberi kewarganegaraan bagi imigran umum. Perbedaannya adalah latar belakangnya. Jika kebanyakan imigran biasa “merantau” dengan alasan ekonomi, latar belakang pemberian suaka tentunya lebih mendesak, yakni lantaran menyangkut kelangsungan hidup si pemohon. Karenanya, proses dan waktu penerimaannya juga relatif lebih cepat. Karena alasan yang mendesak itu pula, banyak badan yang bisa menjadi perantara pemohon suaka.<sup>61</sup>

Beberapa ketentuan penting yang menyangkut hak perlindungan dan kewajiban pengungsi atau penerima suaka sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang status pengungsi 1951, adalah sebagai berikut:

Perlindungan terhadap pengungsi dan atau penerima suaka:

- a. Non-diskriminasi, tidak ada diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, agama, atau negara asal (pasal 3) dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah agama sebagaimana yang dijalankan di negaranya (pasal 4).
- b. Negara dimana pengungsi tersebut berada harus memperlakukan setiap pengungsi dengan perlakuan yang sama sebagaimana orang asing lainnya yang berada di wilayah negara tersebut (pasal 7).
- c. Status persoalan (keperdataan) dari pengungsi akan diatur sesuai dengan hukum dimana ia berdomisili, jika tidak mempunyai domisili maka menurut hukum dimana dia berdiam (*residence*). Hak yang paling asasi, khususnya untuk melakukan perkawinan haruslah diakui (pasal 12).

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 95 -98.

- d. Seorang pengungsi berhak mendapatkan perlindungan untuk memiliki hak atas keyakinan intelektual (seperti: penemuan, desain atau model, merek dagang, hak atas kesusastraan, artistik dan penemuan ilmiah) sebagaimana warga negara dari negara tersebut (pasal 14).
- e. Negara penerima harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pengungsi sebagaimana orang asing lainnya dalam membentuk organisasi non-politik, organisasi nirbala dan serikat perdagangan (pasal 15).
- f. Seorang pengungsi mempunyai kebebasan untuk berperkara di muka pengadilan (pasal 16).
- g. Seorang pengungsi berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga negara tersebut dalam hal memperoleh pendidikan dasar dan perlakuan yang sebaik mungkin dalam bidang pendidikan (pasal 22).
- h. Seorang pengungsi berhak untuk memiliki benda bergerak dan benda tidak bergerak serta menyimpannya seperti orang asing lainnya (pasal 13), serta dapat pula untuk melakukan pemindahan benda-benda tersebut ke negara lain dimana ia diterima (*country of resettlement*) (pasal 30);
- i. Larangan bagi negara penerima untuk melakukan pengusiran (*expulsion*) (pasal 32).
- j. *Non-refoulment*, larangan bagi negara penerima untuk mengembalikan pengungsi kenegara asalnya dimana pengungsi tersebut akan menghadapi penuntutan (pasal 33).

- k. Setiap pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, mendapatkan upah dari pekerjaannya, perumahan, keamanan dan lain-lain (pasal 20-24).
- l. Bagi seorang pengungsi yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah maka akan dikeluarkan surat keterangan untuk itu (pasal 27) dan akan diperkenankan mengajukan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pindah kenegara lainnya (pasal 31 ayat 2).
- m. Segala upaya harus dilakukan oleh negara penerima untuk mempermudah pengungsi dalam melakukan naturalisasi ataupun asimilasi (pasal 34);

Suaka wilayah yang diberikan oleh negara kepada seorang asing di dalam wilayahnya dan suaka di luar wilayah atau suaka diplomatik, yaitu kompleks misi diplomatik atau kompleks lain yang mempunyai hak tidak diganggu gugat. Contoh-contoh suaka wilayah ada banyak dan kelompok-kelompok “pengungsi politik” terdapat di banyak negara tetapi, karena mereka bertempat tinggal di negeri lain, mereka bukan merupakan ancaman besar bagi pemerintahnya sendiri. Suatu situasi timbul dalam suaka diplomatik, dimana lawan politik dapat bertempat tinggal yang terlindung dan tidak dapat diganggu di tengah-tengah rakyatnya, dan dapat diharapkan, rakyat itu hendak diadu melawan pemerintahnya sendiri. Tidak dapat diganggu gugatnya kompleks misi diplomatik menyebabkan misi demikian sejak jaman dahulu dicari untuk dijadikan tempat berlindung.

Persoalan tentang adanya kebenaran hak suaka dari pelaksanaan tindakan politik (tidak biasa dilakukan di dalam perkara kejahatan) terbengkalai untuk waktu lama, dan hanya kadang-kadang menjadi pokok persoalan perdebatan

sengit. Di Eropa praktek ini sudah hampir punah, di daerah-daerah lain kebiasaan daerah masih mendukung kelanjutannya. Praktek di Amerika Latin dapat diikhtisarkan atas dasar konvensi Suaka Diplomatik yang disusun oleh konfrensi antar Amerika ke sepuluh yang dilangsungkan di Caracas di tahun 1954 sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Setiap negara mempunyai hak untuk memberi suaka dan untuk dapat menentukan sendiri sifat pelanggaran atau sebab-sebab penuntutan orang yang sedang mencari suaka.
2. Didalam pemberian suaka, kedutaan tidak saja memakai tempat kedudukan misi diplomatik biasa dan tempat tinggal kepala misi, tetapi juga kompleks lain yang disediakan oleh misi untuk mereka yang minta suaka jikalau jumlahnya melampaui kemampuan tampung gedung-gedung.
3. Suaka hanya di berikan di dalam keadaan yang sangat gawat dan hanya di dalam waktu yang benar-benar diperlukan orang yang minta suaka untuk meninggalkan negeri dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu.
4. Yang disebut persoalan gawat ialah, antara lain jikalau seseorang dicari oleh orang-orang atau gerombolan, yang tidak dikuasai oleh negara, atau oleh pejabat-pejabat sendiri dan diancam kehilangan nyawa atau kebebasan akibat penuntutan politik dan tidak dapat, dengan tidak membahayakan dirinya, menjamin keamanan dirinya dengan cara lain.

---

<sup>62</sup>C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 304-305.

Negara yang memberi suaka menetapkan tingkatan kegawatan suatu persoalan.

5. Memberi suaka kepada orang-orang, yang pada waktu minta suaka sedang berada di dalam tuntutan atau sedang dihadapkan ke sidang pengadilan yang berwenang dan belum menjalani hukuman itu, atau kepada desertir dari angkatan darat, laut dan udara, adalah tidak sah menurut hukum, selain kalau tindakan yang menyebabkan permintaan suaka jelas-jelas mempunyai sifat politik.
6. Segera sesudah diberikan suaka, tindakan itu harus dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri mengenai orang yang telah diberi suaka atau kepada pejabat-pejabat lokal, jikalau peristiwa itu terjadi di luar ibu kota.
7. Pemerintah negara mempunyai hak untuk minta supaya orang yang minta suaka dikeluarkan dari wilayah nasional secepat mungkin dan wakil diplomatik negeri yang telah memberikan suaka, sebaliknya, mempunyai hak menuntut, bahwa orang yang minta suaka diizinkan meninggalkan wilayah dan di dalam kedua hal itu jaminan keamanan dalam hal tidak diganggu gugat harus diberikan.
8. Orang yang diberi suaka, yang diberi jaminan keamanan tidak boleh dilepaskan di suatu tempat di dalam atau dekat, wilayah nasional, dari mana ia telah minta suaka.
9. Pada waktu mendapat suaka, orang yang minta suaka tidak diizinkan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan keamanan umum.

10. Jikalau, sebagai akibat pemutusan hubungan diplomatik, wakil diplomatik yang memberi suaka, harus meninggalkan negara tuan rumah, ia harus diizinkan meninggalkan negara dengan orang yang diberi suaka, atau kalau ini tidak mungkin ia dapat menyerahkan mereka kepada diplomatik negara ketiga.
11. Bahwasanya pemerintah negara tuan rumah tidak diakui oleh negara yang memberikan suaka, tidak merupakan suatu praanggapan bagi penerapan prinsip umum seperti tercantum di atas sedangkan penerapannya tidak berarti suatu pengakuan.

**BAB IV**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK PENERIMA**

**SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**A. Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional**

Berbicara tentang pengungsi atau pencari suaka erat kaitannya dengan HAM karena pengungsi atau pencari suaka adalah sekelompok orang yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi di negara asalnya. Kepergian mereka ke negara lain bukan atas keinginan diri pribadi tetapi terpaksa meninggalkan karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negaranya, sehingga mereka sangat rentan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya.<sup>63</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang relatif baru sejak perjanjian Westphalia tahun 1648 sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 belum menjadi agenda internasional, baru setelah perang dunia kedua berakhir masalah hak asasi manusia dibicarakan dalam pertemuan bilateral dan multilateral. Dalam pertumbuhannya hukum hak asasi manusia internasional dapat dianggap sebagai yang pertama membangun paradigma tentang arti pentingnya hak asasi manusia. Hal tersebut dilandasi pemikiran masa lalu bahwa persoalan moral dan hukum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah. Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi manusia bentuk konstituantenya adalah hukum bukan politik.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>In Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 171.

<sup>64</sup>Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 27.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mutlak yang di berikan Tuhan dan melekat kepada setiap manusia sejak di dalam kandungan.<sup>65</sup> Dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut, karena ia adalah seorang manusia.

Esensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan universal tanpa terikat atribut ruang dan waktu tertentu. Hal tersebut penting mengingat setiap negara tidak menutup kemungkinan membicarakan hukum hak asasi manusia dalam konteks domestiknya. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum pengungsi setidaknya berhubungan dengan tiga hal :

1. Perlindungan terhadap penduduk sipil akibat konflik senjata.
2. Perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan biasa.
3. Perlindungan terhadap pengungsi baik IDP's maupun pengungsi lintas batas.<sup>66</sup>

Hak – hak pengungsi dalam hukum internasional meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (Pasal 3), hak akan kebebasan beragama/berkeyakinan (Pasal 4), hak akan pembebasan dari resiprositas (Pasal 7), hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa (Pasal 8), hak atas status pribadi (Pasal 12), hak atas karya seni perindustrian (Pasal 14), hak untuk berserikat (Pasal 15), hak atas akses ke pengadilan (Pasal 16), hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah (Pasal 17), hak atas swakarya (Pasal 18), hak untuk

---

<sup>65</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Pers, 2015), h. 45.

<sup>66</sup> Koesparmo Irsan, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komisi HAM 2007) h. 6-7.



menjalankan profesinya (Pasal 19), hak atas pengaturan distribusi produk-produk yang kurang persediaannya (Pasal 20), hak memperoleh tempat tinggal (Pasal 21), hak memperoleh pendidikan umum (Pasal 22), hak memperoleh bantuan publik (Pasal 23), hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial (Pasal 24), hak atas bantuan administratif (Pasal 25), hak akan kebebasan berpindah tempat (Pasal 26), hak atas surat identitas (Pasal 27), hak atas pembebasan dari pungutan fiskal (Pasal 29), hak atas pemindahan aset atau harta kekayaan (Pasal 30), hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang illegal (Pasal 31), hak untuk tidak diusir (Pasal 32), dan hak untuk tidak dipulangkan (Pasal 33).<sup>67</sup>

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional lahir karena tidak ada satupun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain, istilah tanggung jawab negara masih terus berkembang agar bisa menemukan konsep yang matang. Salah satu prinsip internasional mengakui masalah tanggung jawab negara sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional.<sup>68</sup>

Di Indonesia, lembaga suaka diakui untuk pertama kalinya pada 1956 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/P.M/1956 tentang “Perlakuan Pelarian Politik”. Pada 2 September 1956 pengakuan tersebut dimantapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang

---

<sup>67</sup> Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 155.

<sup>68</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali, 1991) h. 466.

mengakui hak seseorang guna “mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.” Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilampirkan pada ketetapan tersebut. Setahun kemudian, prinsip lembaga suaka secara yuridis diatur dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Pasal 28). Dan pada tahun lalu presiden mengeluarkan peraturan mengenai penanganan pengungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.<sup>69</sup> Dengan demikian, di tingkat nasional pun lembaga suaka telah memperoleh tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang.

Pengakuan, penghormatan, dan perkembangan lembaga suaka di tingkat internasional yang merupakan lembaga hukum kebiasaan internasional serta pengakuan lembaga tersebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa, termasuk masyarakat Indonesia, akan pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka yang telah diterima secara universal itu. Perkembangan demikian sejalan dengan meningkatnya kepedulian bangsa-bangsa akan pentingnya penghormatan pada Hak Asasi Manusia, yang pelanggarannya merupakan sebab utama timbulnya situasi yang mendorong seseorang untuk terpaksa mencari suaka di negara lain.<sup>70</sup>

Staffan Boderman mengatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka dinegara lain dari ancaman persekusi.” Pemberian

---

<sup>69</sup> Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Op.Cit*, h. 133.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 39-40.

izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama tugas UNHCR. Perlindungan ini menjamin hak asasi manusia pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsi pun dikembalikan secara paksa kenegara dimana ia khawatir bakal mengalami persekusi.<sup>71</sup>

Salah satu prinsip terpenting lembaga suaka adalah prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini melarang negara mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun keperbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya.<sup>72</sup>

## **B. Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional menurut Fiqh Siyasah**

Walaupun menurut hukum Islam hanya kaum Islam sajalah yang mempunyai hak sepenuhnya menurut hukum, tetapi mereka yang beragama lain dapat menuntut perlindungan berdasarkan hukum dari pembesar-pembesar Islam, jika memperoleh izin memasuki daerah Islam. Seorang Islam menurut hukum Islam mempunyai hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya mempunyai beberapa hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya mempunyai

---

<sup>71</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 95.

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 96.

beberapa hak yang tertentu saja, bergantung kepada hubungannya dengan hukum Islam. Mereka yang tidak mempunyai hak berdasarkan hukum yang sepenuhnya.

Seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya ditindas atau dianiaya orang lain dinegerinya sendiri. Dia harus menghindari dari penganiayaan itu meskipun ia harus berangkat (hijrah) meninggalkan negerinya itu ke negara lain yang lebih aman. Jadi, pada prinsipnya Islam itu terbuka untuk mengadakan hubungan persaudaraan dengan melampaui wilayah toritorial negerinya dan agamanya sepanjang hal itu tidak merugikan kepentingan Islam dan umatnya.

Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya berhijrah dan meninggalkan mekkah setelah menyaksikan penyiksaan yang dilancarkan kaum musyrik terhadap para sahabatnya karena khawatir akan terjadinya fitnah pada keimanan mereka. Hijrah ini sendiri merupakan salah satu bentuk siksaan dan penderitaan demi mempertahankan agama. Dalam Islam, berhijrah dari *dar al-Islam* (negeri Islam) memiliki tiga hukum antara wajib, boleh dan haram.

Berdasarkan Deklarasi Cairo pasal (12) menegaskan: “setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari’at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan harus menjaminnya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motifasi karena tindakan yang oleh syari’at dianggap sebagai suatu kejahatan”.

Sementara perlindungan bagi para pengungsi dalam agama Islam juga dikenal yaitu dengan adanya prinsip pemberian perlindungan kepada orang asing yang kemudian dikenal dengan suaka yang diatur dalam Al Qur’an, surah Ibrahim

(XIV) ayat 35, dimana Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan agar masjid yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail menjadi tempat aman (*asylum*) bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan.<sup>73</sup>

Suatu hal yang ditekankan dalam Deklarasi Cairo sehubungan dengan pemberian suaka terhadap yang meminta suaka adalah jika pemberi suaka tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'at.<sup>74</sup>

Adapun masalah hak-hak warga negara non-Islam yang lain, maka mereka akan mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termasuk hak-hak khusus yang diberikan oleh hukum Islam kepada mereka seperti berikut ini:

- a. Mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka.
- b. Mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum persoalan mereka sendiri.
- c. Mereka harus mengikuti hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil karena hukum Islam merupakan hukum negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam kasus meminum anggur dimana warga non-muslim dibebaskan dari hukuman.

---

<sup>73</sup> Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Op.Cit*, h. 169.

<sup>74</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 67.

- d. Orang *dzimmi* mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda mereka.
- e. Mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan *jizyah* sebagaimana telah disebutkan diatas.

Konsep kedaulatan teritorial yang menandakan bahwa didalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara lain. Konsep ini memiliki kemiripan dengan pemikiran patrimonial pemilikan menurut hukum perdata, dan dalam kenyataan memang para penulis pelopor bidang hukum internasional banyak memakai prinsip-prinsip pemilikan dari hukum sipil dalam pembahasan mereka mengenai kedaulatan territorial negara.<sup>75</sup>

Terdapat beberapa hak dan kewajiban menurut fiqh siyasah mengenai suaka politik seperti pengamanan harta benda, penyatuan keluarga, perlindungan khusus anak-anak, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tempat tinggal yang layak, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Sedangkan di dalam hukum internasional hak dan kewajiban pengungsi atau pencari suaka adalah sebagai berikut: seorang pengungsi harus mentaati peraturan perundang-undangan, dan hak – hak pengungsi meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama/berkeyakinan, hak akan pembebasan dari resiprositas, hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa, hak atas status pribadi,

---

<sup>75</sup>J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 210.

hak atas karya seni perindustrian, hak untuk berserikat, hak atas akses ke pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, hak atas swakarya, hak untuk menjalankan profesinya, hak atas pengaturan distribusi produk-produk yang kurang persediaannya, hak memperoleh tempat tinggal, hak memperoleh pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat, hak atas surat identitas, hak atas dokumen-dokumen perjalanan, hak atas pembebasan dari pungutan fiskal, hak atas pemindahan aset atau harta kekayaan, hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang illegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan, aturan mengenai penyatuan keluarga jika memungkinkan, pengaturan harus mengizinkan dan menjamin para pengungsi agar dapat memindahkan harta benda yang dibawa oleh para pengungsi dari negara asalnya ke negara lain (negara ketiga) yang menjadi tujuan mereka yang telah menyatakan menerima mereka. negara pihak wajib memberikan pertimbangan simpatik untuk mengizinkan perpindahan aset mereka kemanapun mereka akan pergi. Ini semua sesuai dengan yang ada dalam fiqh siyasah mengenai hak dan kewajiban pencari suaka bahkan lebih lengkap.

Dan dalam hal ini persamaan hak suaka politik dalam syari'ah Islam dan hukum internasional adalah:

- a. Larangan pemulangan kembali pengungsi ke negara dimana dia menghadapi resiko penganiayaan;

- b. Larangan menjatuhkan hukuman terhadap pengungsi yang masuk atau berada di dalam wilayah suatu negara secara illegal;
- c. Prinsip non-diskriminasi;
- d. Prinsip kemanusiaan hak suaka;
- e. Larangan pemberian suaka kepada pengungsi yang merupakan prajurit perang;
- f. Kemungkinan pemberian suaka kepada tawanan perang
- g. Keharusan penyediaan kebutuhan primer pengungsi
- h. Prasyarat reunifikasi atau penyatuan anggota keluarga pengungsi;
- i. Perlindungan terhadap harta kekayaan dan properti milik pengungsi;
- j. Pemberian hak dan kebebasan dasar kepada pengungsi sebagai manusai dan subyek hukum;
- k. Larangan pemberian suaka kepada para pelaku kejahatan (non-politik);
- l. Kemungkinan bagi para pencari suaka untuk memperoleh perlindungan sementara, dan
- m. Penghentian suaka lantaran hilangnya faktor penyebab kemunculan suaka.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Ahmed Abou-El-Wafa, *Op.Cit*, h. 250-251.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Masalah suaka berkaitan dengan hak asasi manusia, dan negara harus menghormati hak-hak dasar setiap keadaan dan situasi, baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang yaitu hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan jaminan pengadilan, yang selalu dikhawatirkan oleh para pencari suaka dinegerinya akan memberi ancaman kebebasan atau keselamatan hidupnya karena perbedaan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau karena pandangan politiknya sebagai resiko dari perbedaan pandangan dengan pihak penguasa/pemerintah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak-hak penerima suaka politik dalam Hukum Internasional meliputi Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional yang menjamin hak asasi manusia pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsi pun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia khawatir akan mengalami persekusi. Hak mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi atau

bahaya harus diberikan izin masuk di suatu negara, sekurang-kurangnya untuk waktu sementara. Salah satu prinsip terpenting lembaga suaka adalah prinsip non-refoulemen. Prinsip ini melarang negara mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun keperbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya.

2. Menurut Fiqh Siyasah tentang hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional ini sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at karena sesuai dengan yang ada dalam fiqh siyasah seperti hak pengamanan harta benda, penyatuan keluarga, perlindungan khusus anak-anak, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tempat tinggal yang layak, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam hukum internasional semua cakupan itu ada dan terpenuhi bahkan hak dan kewajiban pencari suaka di bahas lebih lengkap.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan berupa saran, setelah mengetahui betapa pentingnya hak-hak suaka politik bagi pencari suaka, yaitu:

- a. Pemerintah atau lembaga yang menangani masalah pencari suaka dan pengungsi, haruslah lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, karena semua hak-hak tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang baik internasional maupun nasional, sebagaimana yang tercantum di dalam *Universal Declaration of Human Right*, Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

- b. Di samping itu para pencari suaka pun haruslah meminta suaka berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 28 ayat 2 yaitu, “hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Dalam hal ini yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau non-politik adalah negara yang menerima pencari suaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsian Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Jakarta: UNHCR Regional Representation Jakarta, 2003
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Bagong Suyanto-Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- C.S.T. Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Cairul Anwar, *Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, Jakarta: Djembatan, 1989
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada media Group, 2014
- Enny Suprpto, *Makalah Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*, Jakarta: 1982
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Departemen Agama, 1986
- Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hasby Ash-shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Huala Adolf, *“Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional”* Jakarta: Rajawali, 1991

- lin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),
- Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung: 2015
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Jurnal Hukum Unsurat, vol.XVIII/No. 1/Januari-April 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Koesparmo Irsan, *Pengungsi Internal Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi HAM 2007
- Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Pers, 2015
- L.Amin widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994
- L.Amin widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Masjid khadduri, *Islam Agama Perang ?*, Yogyakarta: Karunia Indah, 2004
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014
- Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah Analisis Ilmiah manhajiah*
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sulaiman Hamid, "*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*", Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni 1995

Syekh Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani 1996

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Yudha Bhakti Ardhiwirasastra, *Hukum Internasional, Bunga rampai*, Bandung: PT Alumni, 2003